



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

*Jl. Soekarno-Hatta No. 7. A Telp. (0293) 789182 Fax. (0293) 788080
Kota Mungkid 56511*

Tahun 2022

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.. i

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	22
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	33
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	35
	3.3. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB V	: PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat Renja BPBD kabupaten Magelang tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD kabupaten Magelang, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Tahap penyusunan Renja PD Tahun 2023 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal Renja PD, penyiapan rancangan Renja PD, Forum Renja PD, dan penyusunan rancangan akhir Renja PD.

Penyusunan Renja PD Tahun 2023 telah menyesuaikan dengan terbitnya Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Masukan dari peserta forum Renja perangkat daerah menjadi bahan dalam proses penyusunan Renja PD Tahun 2023 melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program dan kegiatan yang terpadu dalam forum Renja PD.

Renja PD Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang selaras dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan:

1. Pedoman bagi BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

1.2. Landasan Hukum

Renja PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Tahun 2023 BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai langkah awal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan untuk mewujudkan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Renja PD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi BPBD Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 2023.
2. Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
3. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPBD tahun 2023

4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, program dan kegiatan penunjang prioritas bupati.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya; dan tabel rencana program dan kegiatan.

5. BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 pada BPBD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 1 urusan, dengan jumlah 2 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

1. Terdapat 2 program dengan predikat kinerja sangat tinggi, dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar ≥ 91 % yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Program Penanggulangan Bencana
2. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 2 program dengan realisasi kinerja sangat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar $91\% \leq 100\%$ yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (90,66)
 - Program Penanggulangan Bencana (94,95)
3. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 1 program dengan predikat tinggi dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar $76\% \leq 90\%$ tidak ada.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada OPD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2021 masuk dalam predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan nilai **111,30 %** dari target **100 %**, sedangkan realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar **92.41 % (Sangat Tinggi)** lebih rendah dari target **100 %**.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan,
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai,
3. Peran serta masyarakat dan aparatur tim pelaksana kegiatan sangat aktif

Perkiraan capaian tahun 2021 yang terdiri dari 1 urusan dan 2 program dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaan kegiatan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya adalah lebih tinggi dikarenakan tercapainya target pelaksanaan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100 %)
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (100%)
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (100%)
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100%)
11. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100%)
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)
15. Pemeliharaan Mebel (100%)

16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
18. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (100%)
19. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (100%)
20. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (100%)
21. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (100%)
22. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (100%)

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (157,10%)
2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (181,92%)
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota (146,23%)

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
3. Adanya Pandemi covid 19 sehingga pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara daring/ zoom meeting

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan
2. Anggaran yang tersedia cukup memadai
3. Peran serta masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan sangat aktif.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Pelayanan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar terpenuhi dengan baik.
2. Respon cepat terhadap penanganan bencana yang baik melalui pengerahan tenaga penanganan bencana secara terkoordinir yang melampaui perencanaan karena adanya peningkatan penanganan terhadap bencana
3. Dengan tingginya tingkat penanganan terhadap penanganan bencana, secara otomatis akan meningkatkan jumlah distribusi logistik kepada warga terdampak bencana tersebut

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah dengan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berakibat penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang kurang maksimal, namun tidak berpengaruh dalam semangat dan jiwa kemanusiaan dalam menolong sesama.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah perlu perencanaan anggaran yang matang dan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang ada yaitu berpedoman pada RPJMD, Renstra dan Renja.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renja PD s/d Tahun 2021 Kabupaten Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		
				Target Renja SKPD Tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		N/a			
1 5 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		N/a			
1 5 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/a			

1	5	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	N/a	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
1	5	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	N/a	4 dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, 4 dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, 12 dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	4 dokumen pelaporan tahunan yang tersusun, 4 dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun, 12 dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	100,00%
1	5	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	N/a	4 kali	4 kali	100,00%
1	5	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/a			
1	5	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/a	12 bulan	12 bulan	100,00%
1	5	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan pertanggung jawaban yang disusun	N/a	9 kegiatan yang dikelola, 1 laporan pertanggung jawaban yang disusun	9 kegiatan yang dikelola, 1 laporan pertanggung jawaban yang disusun	100,00%
1	5	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	N/a	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

1	5	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		N/a				
1	5	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	N/a	1 dokumen	1 dokumen		100,00%
1	5	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		N/a				
1	5	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/a	1 paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		100,00%
1	5	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	N/a	1 paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket Peralatan Rumah Tangga		100,00%
1	5	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	N/a	80 dokumen pustaka	80 dokumen pustaka		100,00%
1	5	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan, Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	N/a	6 rapat koordinasi, 16 perjalanan dinas luar daerah, 53 perjalanan dinas dalam daerah, 11 kali layanan humas dan protokol	9 rapat koordinasi, 13 perjalanan dinas luar daerah, 18 perjalanan dinas dalam daerah, 9 kali layanan humas dan protokol		86,37%
1	5	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	N/a	20 dokumen arsip	20 dokumen arsip		100,00%

1	5	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/a			
1	5	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	N/a	2000 surat	2506 surat	157,10%
1	5	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, Jumlah kebutuhan jasa SDA, Jumlah kebutuhan jasa listrik	N/a	12 bulan jasa komunikasi, 12 bulan jasa SDA, 12 bulan jasa listrik	12 bulan jasa komunikasi, 12 bulan jasa SDA, 12 bulan jasa listrik	100,00%
1	5	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/a			
1	5	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	N/a	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor	2 unit truk, 2 unit tangki, 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor	75,00%
1	5	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	N/a	5 jenis	1 jenis	20,00%
1	5	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	N/a	15 jenis peralatan	8 jenis peralatan	53,33%
1	5	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara, Jumlah gedung yang dipelihara	N/a	2046 meter, 6 gedung	2046 meter, 6 gedung	75,00%
1	5	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		N/a			
1	5	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		N/a			
1	5	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Rakor PRB, Jumlah sosialisai	N/a	2 kali rakor, 1 kali sosialisasi	2 kali rakor, 1 kali sosialisasi	100,00%

1	5	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		N/a			
1	5	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah LEWS	N/a	5 unit LEWS	3 unit LEWS	60,00%
1	5	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana	N/a	2 Paket	0 Paket	0,00%
1	5	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat tanah, Jumlah lokasi rehabilitasi daerah, Jumlah Tim PDNA dan JITU PASNA	N/a	19 sertifikat tanah, 8 lokasi rehabilitasi daerah, 26 orang Tim PDNA dan JITU PASNA	0 sertifikat tanah, 8 lokasi rehabilitasi daerah, 26 orang Tim PDNA dan JITU PASNA	64,15%
1	5	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		N/a			
1	5	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah hari piket TRC, Jumlah pengerahan TRC dan Relawan	N/a	365 hari piket TRC, 520 orang pengerahan TRC dan Relawan	270 hari piket TRC, 1250 orang pengerahan TRC dan Relawan	171,75%
1	5	03	2.03	03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PB dan Pusdalops, Jumlah hari piket Satgas PB dan Pusdalops	N/a	25 orang Satgas PB dan Pusdalops, 365 hari piket	25 orang Satgas PB dan Pusdalops, 273 hari piket	76,41%
1	5	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Distribusi Logistik, Jumlah Droping Air, Jumlah Paket Logistik, Jumlah Pengelola Logpal	N/a	100 kali Distribusi Logistik, 300 kali Droping Air, 1 Paket Logistik, 10 orang Pengelola Logpal	215 kali Distribusi Logistik, 159 kali Droping Air, 1 Paket Logistik, 10 orang Pengelola Logpal	93,67%

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Target Renja PD dan Pencapaian Renja PD Tahun berjalan 2022 Kabupaten Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		N/a			
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		N/a			
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/a			
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	N/a	2 dokumen	2 dokumen	100,00%

1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun(LKPJ, LKJIP dan pelaporan tahunan yang sejenis)	N/a	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	N/a	4 kali	2 kali	50,00%
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/a			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/a	12 bulan	6 bulan	50,00%
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan pertanggung jawaban yang disusun	N/a	11 kegiatan yang dikelola, 12 laporan pertanggung jawaban yang disusun, 1 laporan keuangan yang tersusun	6 kegiatan yang dikelola, 6 laporan pertanggung jawaban yang disusun, 1 laporan keuangan yang tersusun	54,17%
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		N/a			
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	N/a	5 dokumen	2 dokumen	40,00%
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		N/a			

1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/a	1 paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0 paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0,00%
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	N/a	1 paket Peralatan Rumah Tangga	0 paket Peralatan Rumah Tangga	0,00%
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	N/a	80 dokumen pustaka	0 dokumen pustaka	0,00%
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan, Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	N/a	6 rapat koordinasi, 16 perjalanan dinas luar daerah, 53 perjalanan dinas dalam daerah, 11 kali layanan humas dan protokol	3 rapat koordinasi, 13 perjalanan dinas luar daerah, 5 perjalanan dinas dalam daerah, 0 kali layanan humas dan protokol	17,21%
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	N/a	5 dokumen arsip	0 dokumen arsip	0,00%
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	5	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	N/a	1 paket	1 paket	100,00%
						Perlengkapan gedung kantor	N/a	1 paket	1 paket	100,00%
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/a			
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	N/a	3000 surat	856 surat	35,00%

1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, Jumlah kebutuhan jasa SDA, Jumlah kebutuhan jasa listrik	N/a	1 rekening jasa komunikasi, 1 rekening jasa SDA, 3 rekening jasa listrik	1 rekening jasa komunikasi, 1 rekening jasa SDA, 3 rekening jasa listrik	50,00%
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/a	8 jenis		
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	N/a	23 unit	23 unit	50,00%
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang di pelihara	N/a	30 unit	0 unit	0,00%
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	N/a	75 unit	25 jenis peralatan	33,33%
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara, Jumlah gedung yang dipelihara	N/a	2046 meter, 6 gedung	2046 meter, 6 gedung	50,00%
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		N/a			
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		N/a			
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	N/a	385 orang	385 orang	100,00%

1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		N/a			
1 5 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	N/a	20 orang	0	0,00%
1 5 3 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	N/a	30.000 orang	30.948 orang	103,16%
1 5 3 2.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	N/a	60 orang	0 orang	0,00%
1 5 3 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (JITUPASNA)	N/a	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
		Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (VETIVER SYSTEM)		2 Lokasi	6 Lokasi	300,00%
		Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (SERTIFIKAT HUNTAP)		9 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00%

1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terlaksana		2 kali	2 kali	100,00%
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		N/a			
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	N/a	87 kali	229 kali	263,22%
1	5	3	2.03	3	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	N/a	174 orang	66 orang	37,93%
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (distribusi logistik)	N/a	150 kali	145 kali	96,67%
						Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (dropping air)		150 kali	0 kali	0,00%
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana		N/a			
1	5	3	2.04	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 1 aplikasi	N/a	1 Aplikasi	1 Aplikasi	50,00%

2.2. Analis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang kurang dari 100% yaitu **80,86%** dikarenakan Wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dan merupakan daerah rawan bencana yang tersebar di 21 kecamatan. Kabupaten Magelang merupakan supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Magelang kecuali bencana Tsunami.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Magelang baru memiliki Perda no. 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan Rincian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang. Sedangkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 segera berakhir masa berlakunya dan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya terutama untuk Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana.

Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Magelang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Magelang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB maupun dana masyarakat terutama CSR dari dunia usaha.

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2021 sebesar **80.86%** termasuk dalam kategori **tinggi** sesuai tabel 2.2. Untuk target 2019-2024 sesuai dengan SPM dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan ketangguhan Daerah menghadapi bencana			62.89	65.84	68.6		62.89	80,86	68.6		
		Pelayanan informasi rawan bencana		32.17	36.96	41.01		32.17	100,00%	41.01		SPM
		Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		31.45	34.41	41.40		31.45	30,00%	41.40		SPM
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi		100	100	100		100	113,95%	100		SPM
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana		85	85	85		87.93	64,15%	85		non SPM
		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					100					
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tingkat kinerja pelayan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah sesuai dengan motto BPBD Kabupaten Magelang yaitu *“cepat, tepat, menyentuh hati masyarakat”*.

Dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Magelang selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, 10 sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah :

1. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai
2. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
3. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang
4. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
5. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Magelang
6. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang
7. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah kabupaten/ Kota memuat 3 indikator yaitu Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam penanganan bencana adalah :

1. Semua pejabat struktural maupun staf mendapatkan pengetahuan dan pelatihan tentang PB dan standar minimal personil BPBD 94 orang
2. Mekanisme pelaporan dan pendataan kebencanaan ke Provinsi dan Pusat menggunakan sistem informasi kebencanaan yang terprogram
3. Dalam penanggulangan bencana harus disediakan dana siap pakai khusus yang berada di BPBD
4. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana penanggulangan Bencana, Kajian risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi setiap jenis bencana
5. Seluruh desa di kabupaten magelang menjadi destana
6. Seluruh SDM di BPBD kompeten di bidang PB
7. Tempat pengungsian dan jalur evakuasi tersedia dan memadai
8. Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam PB
9. 10 sektor PB dapat bekerjasama pada kegiatan dalam pra, pada saat dan pasca bencana.

Dalam penanggulangan bencana saat ini tidak hanya melibatkan 3 peran yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha saja tetapi ditambahkan dengan peran perguruan tinggi dan media untuk berbagi peran dalam penanggulangan bencana (pentahelix).

Formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Perlunya peningkatan kapasitas bagi aparatur, pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Pengusulan Dana Siap Pakai BNPB dalam penanganan bencana, untuk Kabupaten Magelang memaksimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana.
3. Penanganan bencana menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus untuk desa.

4. Mensukseskan program prioritas Bupati Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
5. Melaksanakan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rakornas BNPB tahun 2020 yaitu : a) Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan; b) Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun Rencana Kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan; c) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif “Pentahelix” yaitu kolaborasi antar unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa; d) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana ; e) Panglima TNI dan KAPOLRI untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perlu dilakukan karena menyesuaikan dengan perkembangan dan standarisasi indeks harga yang di gunakan. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan target kinerja kegiatan dan besarnya anggaran.

Program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dalam hal besaran anggarannya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan yang tidal dapat dianggarkan karena tidak sesuai degan peraturan yang berlaku.

Jumlah usulan dalam Rencana Awal RKPD tahun 2023 adalah Rp.5.158.013.019,00 sedangkan hasil dari Forum SKPD Tahun 2022 anggaran yang di usulkan sebesar Rp. 5.578.659.000,00 lebih besar daripada usulan Rancangan Awal RKPD 2023. Perbedaan disebabkan adanya program dan kegiatan yang sama namun besarnya berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Magelang

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.158.013.019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.578.659.000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	3.486.668.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	3.790.695.000
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	8.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	11.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan tribulanan yang tersusun	4 dokumen					
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	4 dokumen					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 kali	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 kali	1.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	11 kegiatan	2.894.702.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	11 kegiatan	3.001.656.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.834.902.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penggajian dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.941.856.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, jumlah laporan pertanggung-jawaban yang tersusun	11 Dokumen	59.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang dikelola, jumlah laporan pertanggung-jawaban yang tersusun	11 Dokumen	59.800.000
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen			Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	5 dokumen	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	5 dokumen	2.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	5 dokumen	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26 dokumen	3.000.000
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 dokumen	3.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 Jenis	34.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 Jenis	54.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.500.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	40	Kali	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	Laporan	45.000.000
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	12	Kali						
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	40	Kali						
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	30	Kali						
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip yang Dikelola	5	Dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dokumen	2.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	4	Jenis	94.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	4	Jenis	95.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	3200	surat	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3200	surat	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Jumlah Kebutuhan Jasa SDA Jumlah Kebutuhan Jasa Listrik	6 1 3	rekening rekening rekening	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120	Laporan	90.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	Jenis	452.966.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	Jenis	623.039.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	23	unit	300.260.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	unit	345.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perlengkapan yang Dipelihara	30	unit	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	unit	3.875.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Dipelihara	75	unit	67.706.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	unit	60.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Dipelihara	2046	meter	85.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	214.164.000
		Jumlah Paket Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	5	unit						

B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	1.671.345.019	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	1.787.964.000
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	persen			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	persen	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	persen	-	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	persen	78.864.000
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	1	dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	63.864.000
	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	200	orang	-	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	35	orang	15.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	184.424.708	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	117.258.500
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	30.000	orang	55.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	dokumen	55.000.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	60	orang	32.500.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	60	unit	27.100.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Vetifer System)	8	Lokasi	96.924.708					
		Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Sertifikat Huntap)	30	Sertifikat						

		Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Jitupasna)	1	Dokumen				
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang Terlaksana	2	Kali	-	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	35.158.500
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	persen	1.454.146.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.315.502.572
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	87	Kali	254.142.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	254.142.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	174	orang	713.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	576.181.580
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (Distribusi Logistik)	150	Kali	487.004.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	485.178.992
		Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	500	Kali				
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	100	persen	32.774.311	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	276.338.928
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	Aplikasi	32.774.311	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	179.414.220
						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	96.924.708

3.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BPBD Kabupaten Magelang menerima 2 (dua) usulan dari hasil musrenbang kecamatan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Usulan berasal dari Kecamatan Dukun yaitu dari Desa Krinjing mengajukan Pemasangan alat deteksi bencana (EWS) serta dari Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan mengajukan Penambahan Fasilitas Peralatan Dapur Umum di TEA. Usulan oleh desa terkait tidak dapat diakomodir dalam Renja BPBD Tahun 2023 atau tidak masuk dalam prioritas musrenbang kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara nasional, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

Peluang pengembangan pelayanan di tingkat nasional adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten/kota); dan
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Kementerian Dalam Negeri memiliki sejumlah peluang yang dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya dalam meningkatkan kapasitas urusan pemerintahan dalam negeri sejalan dengan tujuan nasional.

Program Bina Administrasi Kewilayahan Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program ini dijabarkan ke dalam Kegiatan, yaitu: Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

BNPB dengan dukungan para pemangku kepentingan telah mampu membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan PB.

Meski demikian masih terdapat dua masalah pokok yang harus terus ditangani yaitu :

- a. Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

- b. Bagaimana upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Renja PD tahun 2023 adalah Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, sedangkan sasaran Renja PD adalah Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana. Hal tersebut sesuai dengan sasaran target kinerja Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024.

3.3. Program dan Kegiatan Penunjang Prioritas Bupati

Tema pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2023 adalah **“Penguatan Kesejahteraan melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing.”** Kejadian luar biasa berupa pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) mempengaruhi berbagai sektor di Kabupaten Magelang, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diselaraskan dengan kebijakan pemulihan dampak covid-19. Pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Mendukung pemulihan akibat dampak Pandemi COVID-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Mendukung prioritas lainnya.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan pada BPBD masuk dalam misi kedua yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Program unggulan BPBD Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana difokuskan pada Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Fokus prioritas ini diampu oleh BPBD melalui program Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun Renja tahun 2023 sebagaimana pada tabel 3.1 sebagai berikut :

tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5.578.659.000
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.790.695.000
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11.500.000
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 %	5.000.000
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	5.000.000
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan 0 Laporan	100 %	1.500.000

1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.001.656.000
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Bulan Penggajian dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Bulan	11 kegiatan	2.941.856.000
1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	11 kegiatan	0
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola, jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Jumlah kegiatan yang dikelola		100 % 100 %	11 dokumen 1 Dokumen	11 kegiatan	59.800.000
1	05	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2.000.000
1	05	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	5 dokumen	2.000.000
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.000.000
1	05	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 Dokumen		3.000.000
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								54.500.000
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Di Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 paket 0 Paket	7 jenis	5.000.000

1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 paket	7 jenis	2.500.000
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	52 Laporan	7 jenis	45.000.000
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5 dokumen	7 jenis	2.000.000
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0
1	05	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Unit	1 paket	0
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 paket	1 paket	0
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3200 Lapora	n 4 jenis	5.000.000

1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	120 Laporan	4 jenis	90.000.000
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								623.039.000
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	23 unit	4 jenis	345.000.000
1	05	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	30 unit	4 jenis	3.875.000
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	75 unit	4 jenis	60.000.000
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5 unit	4 jenis	214.164.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1.787.964.000
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								78.864.000
1	05	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		63.864.000

1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Orang		15.000.000
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								117.258.500
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	55.000.000
1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	60 Unit	100 %	27.100.000
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	30 Orang	100 %	35.158.500
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								1.315.502.572
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	254.142.000

1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	174 orang	100 %	576.181.580
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	450 Orang	100 %	485.178.992
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								276.338.928
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana		100 % 100 %	1 Dokumen	100 % 100 %	179.414.220
1	05	03	2,04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 dokumen	100 % 100 %	96.924.708
TOTAL													5.578.659.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mengacu pada Renstra PD 2019-2024 dan RKPD Tahun 2023 yang nantinya disesuaikan dengan hasil analisis rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat, dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana.

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya untuk tahun 2023 sesuai dengan Renstra PD 2019-2024 adalah sebesar Rp. 5.578.659.000,- dengan 2 program dan 12 kegiatan, sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Magelang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Magelang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5.578.659.000
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.790.695.000
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11.500.000
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 %	5.000.000
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan	100 %	5.000.000
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Laporan 0 Laporan	100 %	1.500.000
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.001.656.000

1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Bulan Penggajian dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	12 Bulan	11 kegiatan	2.941.856.000
1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	1 Dokumen	11 kegiatan	0
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola, jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Jumlah kegiatan yang dikelola		100 %100 %	11 dokumen1 Dokumen	11 kegiatan	59.800.000
1	05	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2.000.000
1	05	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang dikelola	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	1 Laporan	5 dokumen	2.000.000
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.000.000
1	05	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 Dokumen		3.000.000
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								54.500.000
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Di Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	1 paket0 Paket	7 jenis	5.000.000
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	1 paket	7 jenis	2.500.000

1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	52 Laporan	7 jenis	45.000.000
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5 dokumen	7 jenis	2.000.000
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0
1	05	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Unit	1 paket	0
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah paket pengadaan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 paket	1 paket	0
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	3200 Lapora	n 4 jenis	5.000.000
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	120 Laporan	4 jenis	90.000.000

1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								623.039.000
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerahPersentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	23 unit	4 jenis	345.000.000
1	05	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	30 unit	4 jenis	3.875.000
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	75 unit	4 jenis	60.000.000
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	5 unit	4 jenis	214.164.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1.787.964.000
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								78.864.000
1	05	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		63.864.000
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Orang		15.000.000

1	05	03	2,02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									117.258.500
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	55.000.000
1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencanaPersentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %100 %	60 Unit	100 %	27.100.000
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	30 Orang	100 %	35.158.500
1	05	03	2,03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									1.315.502.572
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	4 Dokumen	100 %	254.142.000
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	174 orang	100 %	576.181.580

1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	450 Orang	100 %	485.178.992
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								276.338.928
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana		100 % 100 %	1 Dokumen	100 % 100 %	179.414.220
1	05	03	2,04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 dokumen	100 % 100 %	96.924.708
TOTAL													5.578.659.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Rancangan Awal Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan tahapan perencanaan program lima tahunan dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dimaksud disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan Renja PD 2023 menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pada saat pelaksanaannya mengacu KUA PPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan upaya guna meningkatkan kinerja PD agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran pada tahun 2023.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja PD Tahun 2023 adalah mengusulkan KUA PPAS Tahun 2023 dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai panduan PD melaksanakan kegiatan.

Kota Mungkid, 8 Juli 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

